Kedaulatan Rakyat (Hal.4/HLD) **Jumat, 9 Mei 2025**

DPRD PERTANYAKAN PENGELOLAAN REKLAME

Angka Kemiskinan Hingga Kondisi BUMD

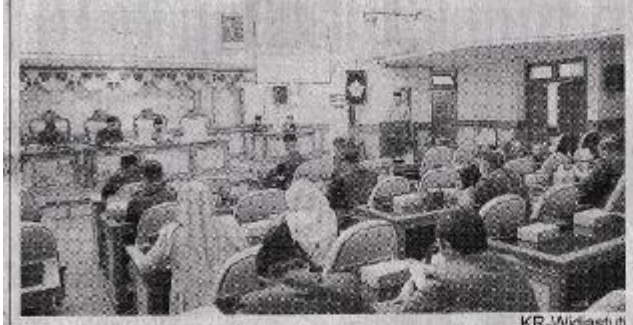

KR-Widiastuti

Banggar menyampaikan Pandangan Umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

PENGASIH (KR) - Salah satu catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan tahun 2024 adalah Pengelolaan Pajak Reklame yang belum berizin (557 reklame) dan yang belum diterbitkan SK Penetapan Pajaknya (165 reklame). DPRD Kabupaten Kulonprogo minta penjelasan terkait upaya-upaya apa yang sudah dan yang akan dilakukan.

Demikian dikatakan Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kulonprogo Tito Kurniawan SH dalam Pandangan Umum Banggar terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, di Ruang Kresna Gedung DPRD setempat, Kamis (8/5).

Banggar juga menyoroti terhadap angka kemiskinan di Kulonprogo masih konsisten pada posisi tertinggi di DIY, meskipun program bantuan tunai untuk warga miskin sudah diberikan.

"Sebenarnya yang dibutuhkan adalah ketrampilan dan lapangan pekerjaan. Upaya apa yang sudah dan akan dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan keterampilan para pencari kerja dan memperluas lapangan kerja di Kulonprogo," kata Tito.

Selain itu, Banggar minta penjelasan dalam upaya memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), apa yang dilakukan Pemerintah Daerah terhadap kinerja dan pendapatan BUMD yang mengalami penurunan di setiap tahunnya.

"Bagaimana kebijakan ke depan untuk meningkatkan dan mengembangkan BUMD agar tidak menjadi beban APBD dan mampu memberikan kontribusi ke PAD secara signifikan," ucap Tito.

Bupati Kulonprogo Dr HR Agung Setyawan ST MSc MM menyatakan realisasi pendapatan Rp1,75 Trilyun atau kurang dari target sebesar 0,37 persen. Realisasi Belanja Rp1,77 Trilyun atau 94,87 persen dari anggaran. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Rp125,2 Miliar atau 96,01 persen dari target. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Rp 12,1 Miliar atau 69,96 persen dari anggaran. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp 89,6 Miliar yang terjadi antara lain karena pelampauan target pendapatan dan efisiensi penggunaan anggaran belanja.

Seusai acara, Agung Setyawan kepada wartawan menuturkan koreksi dari DPRD positif, ada beberapa item, nanti akan diberikan penjelasan. Terkait reklame, perlu kejelasan dan ketegasan mengenai peraturan pemasangan reklame. Ada beberapa bahkan mayoritas reklame yang belum tertata dengan baik.

"Sedangkan angka kemiskinan akan dievaluasi. Dengan daerah lain yang tidak usah disebut di DIY ternyata hanya ada salah persepsi pengambilan penilaian. Kita ini tidak belanja bahan kebutuhan pokok, tidak dalam kondisi miskin, tetapi kita kondisi daerah produksi.

(Wid)